



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 6 Maret 2018

Nomor : 252/PL.03.2-SD/06/KPU/III/2018  
Sifat :  
Lampiran : 1 (satu) dokumen  
Perihal : Program Kependudukan,  
Keluarga Berencana dan  
Pembangunan Keluarga pada  
Debat Publik Pemilihan Tahun  
2018.

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi; dan  
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota  
(daftar terlampir)  
di-

**Tempat**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan meneruskan Surat Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 738/AK.002/G1/2018 tertanggal 15 Februari 2018 perihal Materi Program Debat Publik untuk PILKADA Serentak Tahun 2018 sebagaimana terlampir, bersama ini disampaikan penjelasan hal-hal sebagai berikut :

1. Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi dan misi Pasangan Calon dalam rangka :
  - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. memajukan daerah;
  - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
  - d. menyelesaikan persoalan daerah;
  - e. menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
  - f. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
2. Selain materi tersebut pada angka 1 (satu), perlu dimasukkan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sebagai materi debat dan bagian dari Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3. KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat menambahkan materi debat yang bersifat lebih spesifik pada masing-masing tema sebagaimana tersebut pada angka 1, antara lain materi tentang pemberantasan korupsi, narkoba, tenaga kerja, pendidikan, teknologi informasi, lingkungan hidup, disabilitas, peranan perempuan, dan sebagainya.

Demikian untuk dilaksanakan. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia,



  
Arief Budiman

Lampiran  
 Nomor : 252/FL.03.2-SD/06/KPU/III/2018  
 Tanggal : 6 Maret 2018

NO	PROVINSI	51.	Kota Bogor	121.	Kota Kotamobagu
1.	Provinsi Kalimantan Barat	52.	Kabupaten Banyumas	122.	Kabupaten Minahasa Tenggara
2.	Provinsi Sulawesi Tenggara	53.	Kabupaten Temanggung	123.	Kabupaten Kepulauan Talaud
3.	Provinsi Sulawesi Selatan	54.	Kabupaten Kudus	124.	Kabupaten Morowali
4.	Provinsi Papua	55.	Kabupaten Karanganyar	125.	Kabupaten Parigi Moutong
5.	Provinsi Jawa Barat	56.	Kabupaten Tegal	126.	Kabupaten Donggala
6.	Provinsi Sumatera Utara	57.	Kabupaten Magelang	127.	Kabupaten Bone
7.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	58.	Kota Tegal	128.	Kota Palopo
8.	Provinsi Jawa Tengah	59.	Kabupaten Probolinggo	129.	Kabupaten Sinjai
9.	Provinsi Bali	60.	Kabupaten Sampang	130.	Kabupaten Bantaeng
10.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	61.	Kabupaten Bangkalan	131.	Kabupaten Enrekang
11.	Provinsi Sumatera Selatan	62.	Kabupaten Bojonegoro	132.	Kota Parepare
12.	Provinsi Kalimantan Timur	63.	Kabupaten Nganjuk	133.	Kabupaten Siderang Rappang
13.	Provinsi Jawa Timur	64.	Kabupaten Pamekasan	134.	Kabupaten Jeneponto
14.	Provinsi Riau	65.	Kabupaten Tulungagung	135.	Kabupaten Wajo
15.	Provinsi Maluku	66.	Kabupaten Pasuruan	136.	Kabupaten Luwu
16.	Provinsi Maluku Utara	67.	Kabupaten Magetan	137.	Kabupaten Pinrang
17.	Provinsi Lampung	68.	Kabupaten Madiun	138.	Kota Makasar
NO	KABUPATEN/KOTA	69.	Kabupaten Lumajang	139.	Kota Bau-Bau
1.	Kabupaten Aceh Selatan	70.	Kota Malang	140.	Kabupaten Konawe
2.	Kabupaten Pidie Jaya	71.	Kabupaten Bondowoso	141.	Kabupaten Kolaka
3.	Kota Subulussalam	72.	Kabupaten Jombang	142.	Kabupaten Gorontalo Utara
4.	Kota Padang Sidempuan	73.	Kota Mojokerto	143.	Kota Gorontalo
5.	Kabupaten Padang Lawas Utara	74.	Kota Probolinggo	144.	Kabupaten Mamasa
6.	Kabupaten Batu Bara	75.	Kota Kediri	145.	Kabupaten Polewali Mandar
7.	Kabupaten Padang Lawas	76.	Kota Madiun	146.	Kabupaten Maluku Tenggara
8.	Kabupaten Langkat	77.	Kabupaten Tangerang	147.	Kota Tual
9.	Kabupaten Deli Serdang	78.	Kota Serang	148.	Kabupaten Membramo Tengah
10.	Kabupaten Tapanuli Utara	79.	Kota Tangerang	149.	Kabupaten Paniai
11.	Kabupaten Dairi	80.	Kabupaten Lebak	150.	Kabupaten Puncak
12.	Kota Sawahlunto	81.	Kabupaten Gianyar	151.	Kabupaten Deiyai
13.	Kota Padang Panjang	82.	Kabupaten Klungkung	152.	Kabupaten Jayawijaya
14.	Kota Pariaman	83.	Kota Bima	153.	Kabupaten Biak Numfor
15.	Kota Padang	84.	Kabupaten Lombok Timur	154.	Kabupaten Mimika
16.	Kabupaten Indragiri Hilir	85.	Kabupaten Lombok Barat		
17.	Kabupaten Merangin	86.	Kabupaten Sikka		
18.	Kota Jambi	87.	Kabupaten Sumba Tengah		
19.	Kabupaten Kerinci	88.	Kabupaten Nagekeo		
20.	Kota Lubuklinggau	89.	Kabupaten Rote Ndao		
21.	Kota Pagar Alam	90.	Kabupaten Manggarai Timur		
22.	Kota Prabumulih	91.	Kabupaten Timor Tengah Selatan		
23.	Kabupaten Muara Enim	92.	Kabupaten Alor		
24.	Kota Palembang	93.	Kabupaten Kupang		
25.	Kabupaten Empat Lawang	94.	Kabupaten Ende		
26.	Kabupaten Banyuasin	95.	Kabupaten Sumba Barat Daya		
27.	Kabupaten Lahat	96.	Kabupaten Kayong Utara		
28.	Kabupaten Ogan Komering Ilir	97.	Kota Pontianak		
29.	Kota Bengkulu	98.	Kabupaten Sanggau		
30.	Kabupaten Tanggamus	99.	Kabupaten Kubu Raya		
31.	Kabupaten Lampung Utara	100.	Kabupaten Pontianak		
32.	Kabupaten Bangka	102.	Kabupaten Sukamara		
33.	Kota Pangkal Pinang	103.	Kabupaten Lamandau		
34.	Kabupaten Belitung	104.	Kabupaten Seruyan		
35.	Kota Tanjung Pinang	105.	Kabupaten Katingan		
36.	Kota Bekasi	106.	Kabupaten Pulang Pisau		
37.	Kabupaten Purwakarta	107.	Kabupaten Murung Raya		
38.	Kota Cirebon	108.	Kabupaten Barito Timur		
39.	Kota Sukabumi	109.	Kota Palangkaraya		
40.	Kabupaten Sumedang	110.	Kabupaten Barito Utara		
41.	Kabupaten Bandung Barat	111.	Kabupaten Gunung Mas		
42.	Kota Bandung	112.	Kabupaten Tapin		
43.	Kabupaten Kuningan	113.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan		
44.	Kota Banjar	114.	Kabupaten Tanah Laut		
45.	Kabupaten Majalengka	115.	Kabupaten Tabalong		
46.	Kabupaten Subang	116.	Kabupaten Panajam Pasut		
47.	Kabupaten Bogor	117.	Kota Tarakan		
48.	Kabupaten Garut	118.	Kabupaten Minahasa		
49.	Kabupaten Cirebon	119.	Kabupaten Bolmong Utara		
50.	Kabupaten Ciamis	120.	Kabupaten Sitaro		



Nomor : 738 /AK.002/G1/2018  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Materi Program Debat Publik untuk  
PILKADA Serentak Tahun 2018

Jakarta, 15 Februari 2018

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia

Di tempat

Dengan Hormat,

Upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia adalah prioritas utama bangsa yang membutuhkan kerjasama seluruh sektor pembangunan. Peningkatan mutu manusia sangat tergantung pada komitmen pemerintah termasuk pemerintah daerah di provinsi, kabupaten dan kota. Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya tersebut. Sehingga setiap kepala daerah harus mempunyai visi dan misi untuk membangun sumber daya manusia di daerahnya dengan memberikan perhatian kepada program KKBPK.

Merujuk kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang khususnya pasal 68 ayat 4 dan peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, kami mengharapkan bantuan Ketua KPU RI agar Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga untuk dimasukkan sebagai materi debat pasangan calon kepala daerah serta menjadi bagian dari visi dan misi dalam program kandidat di 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten pada pelaksanaan Pilkada Serentak pada tahun 2018.

Sekaitan itu pula, kami menyiapkan tim teknis BKKBN yang dapat membantu Komisi Pemilihan Umum RI dalam memberikan masukan materi program KKBPK untuk debat, apabila diperlukan. Untuk kontak personal dapat menghubungi: Direktur Advokasi dan KIE, BKKBN (Sugiyono: 0821-9675- 0819/0812-8258-6390).

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ✓

Jl. Permata No. 1, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur 13650 PO.BOX : 1314 JKT 13013  
Telp : 8009029 (5 Line), 8008371 (10 Line) Fax.:(021) 8008554 Website : <http://www.bkkbn.go.id>

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



**Tembusan Yth:**

1. Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2. Pejabat Tinggi Madya BKKBN
3. Ketua KPU Provinsi
4. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi
5. Ketua KPU Kabupaten dan Kota

## **Contoh Materi**

### **Program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan Bonus Demografi**

#### **I. Pertanyaan :**

1. Bagaimana menyingkapi permasalahan kependudukan di Indonesia ?
  - a. Kuantitas penduduk tinggi ?  
Indonesia : Laju Pertumbuhan Penduduk masih tinggi ? (**LPP** : 1,49 % Sensus Penduduk 2010 & **TFR** : 2.4 SDKI 2017) ?
  - b. Kualitas penduduk (Pendidikan, Kesehatan, Agama, Ekonomi, Sosial Budaya) penduduk masih rendah ?
  - c. Pembangunan Keluarga belum optimal
  - d. persebaran penduduk belum proporsional yang serasi dengan daya tampung alam daya dukung lingkungan ?
  - e. Administrasi penduduk yang belum memadai ?

#### **Jawaban :**

- a. Pengendalian kuantitas Penduduk dengan cara Pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas melalui program Keluarga Berencana, bertujuan : Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera
- b. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kualitas penduduk di bidang kesehatan, pendidikan, agama, ekonomi, dan sosial budaya.
- c. Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni.
- d. mengupayakan peningkatan mobilitas penduduk yang bersifat tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan mobilitas penduduk; dan mengurangi mobilitas penduduk ke kota metropolitan atau kota besar.
- e. Melakukan penataan dan pengelolaan database kependudukan; penertiban dan pnerbitan dokumen kependudukan.

#### **II. Pertanyaan :**

2. Strategi apa yang dilakukan untuk menghadapi Bonus Demografi dalam menyambut Indonesai Emas ?

#### **Jawaban :**

- Indonesia baru masuk era Bonus Demografi sejak tahun 2012 dan puncaknya pada tahun 2028 – 2030 dan diperkirakan akan berakhir pada tahun 2045-2050 ( Indonesia emas)
- Bonus demografi adalah sebuah potensi manfaat ekonomi dimana jumlah penduduk terbanyak adalah penduduk di usia produktif 15-64 tahun menanggung penduduk usia non produktif 0 -14 dan 65 tahun keatas lebih sedikit / (2 : 1).

- Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah yaitu melakukan intervensi kebijakan melalui investasi sumber daya manusia serta mendukung investasi kapital :
  - Meningkatkan jaminan kesehatan dan perbaikan nutrisi
  - Memperluas pendidikan menengah universal
  - Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan tinggi
  - Meningkatkan produktivitas angkatan kerja dan usia lanjut
  - Pengembangan produk tabungan, deposit, saham, dan jenis investasi jangka panjang lainnya
  - Stabilitas politik dan ekonomi
  - Sistem perbankan dan investasi yang mumpuni
  - Sistem pensiun yang berkesinambungan
  - Kebijakan lain yang menunjang optimalisasi bonus demografi yang berorientasi pada penduduk dan keluarga berdasarkan pendekatan siklus hidup. (anak-anak → dewasa → Orang tua)